



Skripsi bimbingan Mei untuk cek plagiasi

ID : 3270990448379a080081c0fe1e6943b8fa76018e



7% Suspicious texts

File name : Skripsi bimbingan Mei untuk cek plagiasi.txt
 Original file size : 4.1 MB
 Number of words : 5,172
 Number of characters : 41556

Submitter : UMSIDA Perpustakaan
 Submission date : May 13, 2026
 Upload type : interface
 analysis end date : May 13, 2026

Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :

Similarities 5%

Syntactics 5% Semantics *Not measured*

Passages with similarities to sources found in different collections.



AI detection 1%

Texts with stylistically similar formulations to AI-generated text.

This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.



Unrecognized languages <1%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to modify the text to make detection impossible.



Not included in the percentage of suspicious texts :

Texts between quotes 0%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.



Similarities

5%


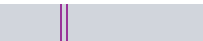

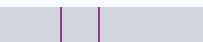



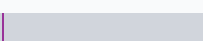

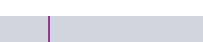

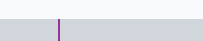






Passages with similarities to sources found in different collections.



Main source detected

No.	Description	Similarities	Locations
1	 BPIPI Kemenperin bpipi.kemenperin.go.id/ ↗	1%	
2	 core.ac.uk core.ac.uk/download/pdf/483722024.pdf ↗	<1%	

Source with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations
3	 binamarga.pu.go.id binamarga.pu.go.id/bsljl/uploads/files/42/8f782169e5f3c43973d750f179d654e9.pdf ↗	<1%	
4	 Ground Breaking Gedung BPIPI, Wujud Komitmen Kemenperin... www.industripedia.online/public/agro/ground-breaking-gedung-bpipi-wujud-komi... ↗	<1%	
5	 Pedoman Penyusunan Anggaran Unand repo.unand.ac.id/28510/1/PR.%20No%2014%20Pedoman%20Penyusunan%20Ang... ↗	<1%	
6	 ARTIKEL DIANA BAB 1-5 REV 1 #28ca7a 👤 Comes from my group	<1%	
7	 MANAJEMEN KEUANGAN: MONEY FOLLOW FUNCTION MENJADI MONEY... makalahmanajemenkeuangan.blogspot.com/2017/02/money-follow-function-me... ↗	<1%	
8	 Modul Pembelajaran Pembiayaan & Penganggaran Kesehatan repository.uhamka.ac.id/id/eprint/44738/1/Modul%20Pembelajaran%20Pembiaya... ↗	<1%	
9	 PERMEN Nomor 3 Tahun 2022 — Organisasi dan Tata Kerja Balai... pasal.id/peraturan/permen/permenperin-no-3-tahun-2022 ↗	<1%	
10	 anggaran.kemenkeu.go.id anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/24f47d77-4115-4718-aaad-1f121bb4c76a ↗	<1%	
11	 Penyajian Dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja Selama Masa... dx.doi.org/10.32663/jaz.v4i2.2442 ↗	<1%	



Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Performance-Based Budget Expenditure at the Indonesian Footwear Industry Empowerment Center for Periode 2020-2024
[Analisis Efektivitas dan Efisiensi Belanja Anggaran Berbasis Kinerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Periode 2020-2024]

Ira Safiratul Ulum¹⁾, Akhmad Mulyadi^{*2)}

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: akhmadmulyadi@umsida.ac.id

Abstract. The budget is an accountability instrument for the management of public funds that plays a crucial role as a guideline in carrying out the duties of a public sector entity. Public sector organizations are required to conduct their activities effectively and efficiently based on budget performance. This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of performance-based budget spending at the Indonesian Footwear Industry Empowerment Center during the 2020–2024 period. This study employs a descriptive quantitative method with data analysis through the measurement of budget performance values. The results of this study indicate that the budget performance of the Indonesian Handicraft Industry Empowerment Center has been implemented with due consideration of the principles of budget effectiveness and efficiency. The percentage of budget performance values for the 2020–2024 period as a whole falls into the good and very good categories, with values of 86.55% in 2020, 99.78% in 2021, 97.53% in 2022, 98.60% in 2023, and 93.32% in 2024. To improve the level of effectiveness and efficiency in performance-based budgeting, coordination and cooperation among stakeholders are required in developing a sound budget plan. **Keywords** – performance-based budgeting, budget effectiveness, budget efficiency, budget performance, public sector.

Abstrak. Anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang memiliki peran penting sebagai pedoman dalam menjalankan tugas suatu entitas sektor publik. Organisasi sektor publik dituntut untuk menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien dengan berdasarkan pada kinerja anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis efektivitas dan efisiensi belanja anggaran berbasis kinerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia selama periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis data melalui pengukuran nilai kinerja anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kinerja anggaran Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia telah dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai efektifitas dan efisiensi anggaran. Persentase nilai kinerja anggaran pada periode 2020 – 2024 secara keseluruhan berada pada kategori baik dan sangat baik dengan nilai sebesar 86,55% pada tahun 2020, 99,78% pada tahun 2021, 97,53% pada tahun 2022, 98,60% pada tahun 2023, dan 93,32% pada tahun 2024. Untuk meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam anggaran berbasis kinerja diperlukan kordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyusun rencana anggaran yang baik. **Keywords** – anggaran berbasis kinerja, efektivitas anggaran, efisiensi anggaran, kinerja anggaran, sektor publik.

I. Pendahuluan

Anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik.[1] Anggaran sektor publik menjadi tolak ukur dalam pengendalian pelaksanaan program di suatu Instansi Pemerintah.[2] Pengelolaan Anggaran tidak hanya dilaksanakan dengan berfokus pada persentase realisasi belanja yang telah digunakan, namun juga harus digunakan dengan efektif berdampak langsung pada Masyarakat dan efisien dengan meminimalisir pemborosan sumber daya. Setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, diwajibkan untuk mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran harus mencerminkan prinsip value for money, yakni keseimbangan antara efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam setiap pengeluaran negara.

Efisiensi adalah bentuk sinkronisasi antara output dan input yang didapatkan oleh sebuah instansi atau organisasi. Efisiensi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan output yang dihasilkan dan input yang digunakan.[3] Pengelolaan anggaran yang efisien menjadi sangat krusial untuk dilakukan dikondisi negara dengan keterbatasan sumber daya fiskal, sementara kebutuhan pembangunan perlu dilakukan secara massif. Secara Teoritis pengelolaan anggaran yang dilakukan secara efisien merupakan salah satu prinsip dari penerapan Value for Money dalam proses penerapan manajemen keuangan, tanpa penerapan efisiensi dalam pengelolaan anggaran akan



11

terjadi pemborosan atau Inefficiency yang membuat Instansi pemerintah akan menghabiskan alokasi dana APBN/APBD untuk kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah ekonomi dan tidak berdampak pada kesejahteraan Masyarakat. Efektivitas adalah Tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan atau visi misi organisasi, dalam hal ini Efektivitas berorientasi pada hasil yang didapat. Sebuah program dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan atau target kebijakan (hasil guna).[4] Dalam proses pengelolaan anggaran pemerintah, Efektivitas merupakan dasar utama untuk mengukur keberhasilan penggunaan uang negara telah digunakan dengan tepat. Pengelolaan anggaran oleh instansi pemerintah yang efektif akan berdampak pada reputasi dan kepercayaan publik yang semakin tinggi terhadap instansi terkait. Selain itu, efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang telah dicapai oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas dan waktu, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.[5] Oleh karenanya, efektivitas merupakan salah satu prinsip yang fundamental dalam proses pengelolaan keuangan negara yang memiliki fokus pada kemampuan realisasi anggaran yang bisa memberikan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Meski demikian, tidak sedikit instansi pemerintah yang melakukan pengelolaan keuangan negara secara tidak efektif, ketidakefektifan ini bisa disebabkan oleh adanya ketidakselarasan antara anggaran dan kegiatan dengan sasaran strategis yang telah disusun.[6] Kecenderungan untuk tetap menjalankan kegiatan administratif tanpa dilakukannya evaluasi berkelanjutan untuk mengetahui dampak yang konkrit kepada masyarakat.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien memberikan dampak positif dalam peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, penyusunan rencana kerja yang jelas dengan menunjukkan korelasi antara input (alokasi anggaran), output (output kegiatan), dan outcome (manfaat bagi masyarakat).[7] Adanya ketidakseimbangan antara efektivitas dan efisiensi dapat berdampak pada pemborosan anggaran, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak tepat sasaran, dan rendahnya nilai manfaat dari belanja negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi secara bersamaan dalam anggaran berbasis kinerja untuk membuktikan tingkat pengelolaan anggaran telah dilakukan dan memenuhi prinsip value for money.[8]

Sebagai bagian dari reformasi pengelolaan anggaran, Indonesia mulai menerapkan anggaran berbasis kinerja sejak diterbitkannya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dituangkan pada penjelasan penyusunan dan penetapan APBN dan APBD.[9] Pada awal Tahun 2025, penerapan penganggaran berbasis kinerja lebih ditekankan dengan diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan sebuah instruksi presiden tentang efisiensi belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melakukan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp 50,59 triliun.[10] Secara empiris, adanya kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memperkuat prinsip pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif melalui dorongan untuk melakukan penghematan. Secara spesifik, inpres ini membatasi belanja anggaran yang tidak produktif dan tidak berhubungan dengan target kinerja.[11] Dengan mengurangi pos-pos anggaran yang tidak memberikan dampak secara langsung kepada Masyarakat, dana anggarannya dapat dialihkan kepada program-program yang lebih efektif mendukung tujuan Kementerian/Lembaga, sehingga pelaksanaan anggaran akan lebih tepat guna.[12] Selain memberikan efek positif pada pelaksanaan anggaran, adanya Pemangkasan anggaran melalui kebijakan tersebut juga memberikan dampak negatif bagi beberapa Kementerian/Lembaga.[13] Sejumlah Kementerian/Lembaga terkena dampak pada pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan, hal ini bisa disebabkan oleh dua hal yakni kebijakan yang menargetkan nilai efisiensi yang besar dan ditetapkan dalam waktu yang cepat, serta penyusunan rencana strategis (Renstra) yang kurang baik tanpa memperhitungkan skenario fiskal yang mungkin terjadi di masa depan sehingga Kementerian/Lembaga akan kesulitan untuk beradaptasi dengan kebijakan yang baru.[14]

Ketentuan penyusunan Rencana Strategis satuan kerja harus menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja.[15]. Dengan adanya pendekatan anggaran berbasis kinerja akan menghapus paradigma dari standar penganggaran tradisional yang mengukur keberhasilan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dari tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, karena pengukuran tersebut tidak relevan dengan kondisi saat ini, nilai penyerapan yang tinggi tidak selalu mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Meskipun pendekatan berbasis kinerja ini telah diterapkan secara nasional, di beberapa Satuan Kerja Kementerian/Lembaga masih mengalami kendala dalam pengimplementasiannya seperti proses anggaran yang terlalu fleksibel, adanya keterlambatan pencairan dana, realisasi anggaran yang tidak konsisten, serta kurangnya monitoring dalam pengelolaan belanja negara.[16]

Pada praktiknya, dalam penggunaan anggaran belanja melalui APBN menunjukkan bahwa masih ada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga ditemui dalam menyusun perencanaan penganggaran masih kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan implementasi kebutuhan di lapangan, sehingga masih ada alokasi anggaran yang terealisasi dengan output yang kurang terukur, seperti pada penelitian[17]. Hal ini disebabkan oleh adanya kelemahan dalam menyusun indikator-indikator capaian output yang menjadi target kinerja sebuah Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang berakibat pada kurang relevannya pengajuan dana alokasi anggaran sehingga pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tidak tepat sasaran.[18] Oleh karenanya diperlukan koordinasi dan komunikasi antar manajemen dalam memahami komponen-komponen terkait pada saat pengajuan anggaran, serta dilakukannya Evaluasi, Monitoring, dan Spending Review atas program dan kegiatan yang telah dijalankan menggunakan data kinerja yang kredibel dan akurat.[19]



Pentingnya melakukan analisis anggaran berbasis kinerja Kementerian/Lembaga untuk mengidentifikasi kualitas pengelolaan anggaran belanja negara berjalan dengan baik, hal ini selaras dengan penerapan anggaran berbasis kinerja yakni untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik dengan menghubungkan pendanaan organisasi sektor public dengan hasil yang dicapai melalui informasi kinerja yang sistematis.[20] Pelaksanaan analisis anggaran kinerja yang baik akan meningkatkan penyerapan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah, sebab orientasi pada kinerja akan menciptakan jadwal pelaksanaan program dan penyerapan anggaran yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan proses pemantauan dan evaluasi ulang program yang telah dilaksanakan.[21] Selain itu, penge Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki fokus pelayanan pada pemberdayaan industri alas kaki di Indonesia, BPIPI berkomitmen memberikan Pelayanan terbaik dengan adanya penguatan struktur industri, pengembangan produk, peningkatan kreativitas dan inovasi, perluasan kesempatan kerja bagi IKM Alas Kaki serta penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antar industri alas kaki Kecil, Menengah, dan besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya sesuai keunggulan potensi daerah dan pendalaman struktur industri. Di tengah banyaknya produk asing yang masuk kedalam pasar lokal, peran BPIPI diharapkan mampu hadir ditengah-tengah pelaku industri alas kaki dalam meningkatkan keberlanjutan daya saing pasar. Tidak hanya berfokus dalam peningkatan produk yang berkualitas tinggi, BPIPI juga mendorong keberhasilan pembentukan ekosistem kewirusahaan yang kuat dan kemandirian industri alas kaki, tentu hal ini selaras dengan Prioritas Nasional 3 (tiga) yakni Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.[22] Berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Satuan Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, perencanaan pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik menjadi salah satu dasar yang penting bagi BPIPI untuk bisa menjangkau semua lini pelaku industri agar bisa merasakan manfaat dari pelayan yang diberikan. Lebih lanjut lagi, analisis kinerja anggaran berbasis kinerja menjadi aspek penting, khususnya bagi Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) yang merupakan satu-satunya instansi pemerintah dengan fokus pelayanan pada industri alas kaki. BPIPI menjadi objek penelitian yang relevan dalam topik ini, mengingat lingkup wilayah industri yang menyebar di seluruh Indonesia memerlukan perencanaan penganggaran dan program yang lebih kompleks dan terstruktur, dengan adanya data analisis ini dapat menjadi dasar penentuan kebijakan di periode anggaran berikutnya serta berpotensi menemukan permasalahan yang mungkin timbul, sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko di masa depan. Hal ini akan sangat relevant dengan tujuan dari penelitian yang diambil yakni untuk melakukan analisis tingkat Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Anggaran Berbasis Kinerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Periode 2020-2024.

LANDASAN TEORI

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan sebuah perencanaan financial atas perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang akan diharapkan terjadi di masa depan dengan menjadikan data yang periode sebelumnya sebagai acuan dalam menyusun anggaran.[23] Dalam anggaran ini mencerminkan tentang tujuan dan sasaran kinerja yang akan dilakukan oleh organisasi publik dalam periode tertentu, oleh karenanya pada saat melakukan penyusunan anggaran sektok publik yang perlu dijadikan perhatian adalah dalam menentukan tingkat prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan visi misi organisasi publik yakni memberikan pelayanan untuk masyarakat.[24] Siklus dalam Anggaran sektor publik sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.[20]

Belanja Negara

Belanja negara merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada sebuah instansi pemerintah yang mengurangi saldo anggaran dari periode tahun berjalan. Belanja negara biasanya digunakan untuk operasional pemerintahan maupun untuk mendukung terselenggaranya suatu program-program pemerintah.[25] Belanja negara dalam penyusunan anggaran pemerintah pusat berdasarkan PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran terbagi menjadi beberapa jenis dengan 2 (dua) kode akun yakni belanja pegawai dengan kode akun 51, belanja barang/jasa dengan kode akun 52, belanja modal merupakan akun 53, dan bantuan sosial kode akun 57.[26] Tujuan dari penggunaan 2 (dua) kode akun pada setiap jenis belanja ini untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran dan memberikan fleksibilitas dalam proses penyusunan anggaran.[26]

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting) merupakan sistem penganggaran yang menghubungkan anggaran dana yang telah dialokasikan oleh sektor publik dengan hasil atau kinerja yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut, sehingga dalam hal ini proses penganggaran tidak hanya berorientasi pada input, namun juga pada output dan income. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,

serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, landasan konseptual yang mendasari penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja meliputi :

Pengalokasian anggaran berorientasi pada kinerja keluaran (Output) dan Hasil (Outcome)

Pengalokasian anggaran program/kegiatan pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money Follow Program) melalui PBK

Terdapat fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages)

Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan keluaran yang maksimal dengan pengelolaan dan penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin[3], nilai ini diperoleh dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan target atau pagu anggaran. Sedangkan Efektivitas dapat diperoleh setelah unsur efisiensi telah terpenuhi, secara umum dijadikan sebagai taraf keberhasilan dari program pemerintah yang tercapai. Penelitian sebelumnya [27] juga menjelaskan bahwa efektivitas dan efisiensi memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran.

Kerangka Konseptual

Dalam kerangka ini, kinerja pengelolaan belanja anggaran dianalisis melalui dua komponen utama yakni efektivitas anggaran dan efisiensi anggaran. Efektivitas anggaran digunakan untuk melakukan pengukuran capaian output dari program atau kegiatan yang telah disusun, pada tahap ini perhitungan menggunakan variable capaian output program dengan membandingkan realisasi capaian output program dengan target capaian output program. Sedangkan efisiensi anggaran digunakan untuk menghitung optimalisasi penggunaan anggaran, pada tahap ini memiliki beberapa variable yang saling terkait yakni nilai realisasi anggaran, tingkat konsistensi penyerapan anggaran dalam perencanaan, dan nilai efisiensi output program. Hasil penilaian kinerja anggaran akan diperoleh melalui penjumlahan hasil pengukuran dari setiap variable pada masing-masing komponen.[28]

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konseptual

II. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif dimana proses pengolahan datanya menggunakan sumber data sekunder. Kuantitatif merupakan jenis data yang bisa diukur maupun dihitung secara langsung, berupa informasi maupun angka yang disampaikan melalui bilangan atau berbentuk angka. Sedangkan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variable (mandiri), baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variable lain.[29] Pada definisi lain bisa dijelaskan bahwasanya metode Deskriptif Kuantitatif merupakan metode yang membantu menggambarkan, menunjukkan atau meringkas data dengan cara yang konstruktif.[30] Dalam hal ini peneliti ingin memberikan gambaran secara faktual terhadap kinerja Program dan Anggaran yang telah dilakukan selama lima periode terakhir dilaksanakan secara efektif dan efisien atau masih diperlukannya perbaikan oleh Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia.

Jenis dan Sumber Data

Peneliti memanfaatkan data sekunder yang telah terpublikasikan melalui laman Website resmi Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia sebagai sumber utama dari pengumpulan data. Data sekunder merupakan sebuah sumber data yang tidak langsung memberikan sumber data kepada pengumpul data[31], berikut data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian :

Dokumen Anggaran (DIPA)

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Laporan Keuangan Tahunan Periode 2020-2024

Metode Analisis Data

Teknik Analisis yang dilakukan adalah pengujian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan analisis rasio dan perbandingan. Analisis rasio berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih bermakna dibandingkan angka absolut karena mampu menunjukkan hubungan relatif antardata.[32] Dengan demikian, analisis rasio membantu peneliti memahami kinerja atau karakteristik fenomena secara lebih komprehensif. Selain itu, analisis perbandingan dilakukan untuk membandingkan nilai suatu variabel antarperiode, antarunit, atau antarkomponen sehingga dapat terlihat adanya perubahan, peningkatan, atau penurunan dalam jangka waktu tertentu. Teknik analisis ini tepat digunakan untuk penelitian yang dipilih untuk melakukan perbandingan realisasi anggaran dan realisasi kinerja program yang telah disusun dan mengetahui pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat dilakukan analisis kinerja anggaran sebagai berikut :

Analisis Capaian Rincian Output

Rincian output merupakan capaian riil yang dihasilkan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut rumus pengukuran capaian output sebagai berikut :

Realisasi Output =

Keterangan :

m: Jumlah Rincian Output (RO)

Realisasi Output =

Keterangan :

m: Jumlah Rincian Output (RO)

Analisis Realisasi Belanja

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Rumus pengukuran kinerja realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Penyerapan anggaran =

Penyerapan anggaran =

Efisiensi Rincian Output

Efisiensi pada rincian output dilakukan perhitungan untuk membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan anggaran yang telah dialokasikan. Rumus untuk mendapatkan nilai efisiensinya adalah sebagai berikut :

ERO =

Keterangan :

ERO : Efisiensi RO

AAROi : Alokasi anggaran RO i

RAROi : Realisasi anggaran RO i

CROi : Capaian RO i

ERO =

Keterangan :

ERO : Efisiensi RO

AAROi : Alokasi anggaran RO i

RAROi : Realisasi anggaran RO i

CROi : Capaian RO i

Nilai Efisiensi =

Nilai Efisiensi =

Setelah dilakukan pengukuran selanjutnya melakukan penilaian efisiensi rincian output untuk melakukan transformasi skala efisiensi antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan rumus berikut :

Konsistensi Penyerapan Anggaran

Analisis rasio konsistensi penyerapan anggaran memiliki kaitan positif terhadap perencanaan realisasi anggaran yang telah disusun berdasarkan rancangan program yang akan dilakukan setiap bulannya oleh satuan kerja instansi. Untuk menentukan nilai konsistensi penyerapan, menggunakan rumus berikut :

K =

Keterangan :

K: Konsistensi Penyerapan

RAKn: Realisasi angka kumulatif sampai bulan n

RPDKn: Rencana penarikan dana kumulatif sampai bulan n

n: Jumlah bulan

K =

Keterangan :

K: Konsistensi Penyerapan

RAKn: Realisasi angka kumulatif sampai bulan n

RPDKn: Rencana penarikan dana kumulatif sampai bulan n

n: Jumlah bulan

Analisis Nilai Kinerja Anggaran

Hasil akhir atas nilai kinerja dapat diketahui dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel dengan bobot masing-masing variabel. Adapaun bobot masing-masing variabel berdasarkan tabel berikut :

Table 1 Bobot Variabel Penilaian Kinerja

Bobot Variable Penilaian Kinerja Anggaran

Bobot penyerapan anggaran (WP) 9,7 %

Bobot konsistensi penyerapan anggaran (WK) 18,2 %

Bobot Capaian Rincian Output (WCRO) 43,5 %

Bobot Efisiensi RO (WE) 28,6 %

Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI : \frac{(P \times WP) + (K \times WK) + (CRO \times WCRO) + (NE \times WE)}{100}$$

Keterangan :

P: Penyerapan anggaran

K: Konsistensi penyerapan anggaran

CRO: Capaian output program

NE: Nilai efisiensi

$$NKI : \frac{(P \times WP) + (K \times WK) + (CRO \times WCRO) + (NE \times WE)}{100}$$

Keterangan :

P: Penyerapan anggaran

K: Konsistensi penyerapan anggaran

CRO: Capaian output program

NE: Nilai efisiensi

Kriteria penilaian kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021[28] tentang pengukuran kinerja anggaran yang disusun sebagai berikut :

Table 2 Rasio Nilai Kinerja Anggaran

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria

90 % Sangat Baik

80% - 90% Baik

60% - 80% Cukup

50% - 60% Kurang

Sangat Kurang

III. Hasil dan pembahasan

Analisis Capaian Output

Sebelum tahun anggaran berjalan Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penyusunan rencana strategis yang dituangkan dalam Rincian Output yang mencerminkan tugas dan fungsi spesifik unit kerja. Capaian Output merupakan indikator utama dalam melakukan pengukuran keberhasilan secara fisik ataupun layanan dari kegiatan yang dianggarkan oleh instansi. Analisis Capaian output dilakukan untuk membandingkan antara target volume keluaran dengan realisasi fisiknya di lapangan, hal ini tentu sesuai dengan prinsip efektivitas yang didefinisikan sejauh mana target yang direncanakan dapat tercapai secara fisik. Dalam perhitungan nilai kinerja anggaran, capaian RO memiliki skala maksimal 100% [28].

Tabel 3. Rekapitulasi Capaian Rincian Output Periode 2020-2024

Tahun Uraian RO Target RO Realisasi RO

2020 Pengembangan Layanan IKM Persepatuan Melalui BPIPI 200 Industri 200 Industri

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 1 Layanan

Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan

2021 Fasilitas dan pengembangan industri 100 Industri 300 Industri

Penyidikan dan pengujian produk 150 Industri 326 Industri

Penelitian dan pengembangan purwarupa 24 Industri 60 Industri

Layanan perkantoran 2 Layanan 2 Layanan

2022 Pengembangan Layanan IKM Persepatuan Melalui BPIPI 130 Industri 169 Industri

Layanan Perkantoran 2 Layanan 2 Layanan

2023 Pengembangan Layanan IKM Persepatuan Melalui BPIPI 130 Industri 177 Industri

Layanan Perkantoran 2 Layanan 2 Layanan

2024 Pemberdayaan IKM Persepatuan Melalui BPIPI 150 Industri 188 Industri

Layanan Perkantoran 2 Layanan 2 Layanan

Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1 Dokumen 1 Dokumen

Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen

Perhitungan dengan menggunakan rumus Analisis Rincian Capaian Output dengan berdasarkan data pada tabel 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perhitungan Analisis Capaian Rincian Output BPIPI Periode 2020-2024

Tahun Target Volume Rincian Output Realisasi Volume Rincian Output Capaian RO (%) Skala Maksimal %

2020 202 202 100% 100%

2021 276 688 201% 100%

2022 132 171 114% 100%

2023 132 179 116% 100%

2024 154 192 106% 100%

Berdasarkan data pada tabel Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan realisasi volume rincian output, hal ini disebabkan karena efek dari wabah pandemi covid yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak BPIPI dalam melaksanakan kegiatan, selain itu pemerintah juga menerapkan adanya social distancing yang juga menjadi tantangan baru bagi BPIPI untuk merubah strategi pelaksanaan kegiatan. Selama periode 2020-2024 data realisasi Capaian output selalu memenuhi target yang ditentukan, namun terjadi penurunan penetapan target capaian output yang sangat signifikan antara tahun 2021 dan 2022, hal tersebut karena adanya perubahan organisasi dan tata kerja sesuai peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia yang lebih fokus pada penguatan kapasitas pelaku industri secara menyeluruh, tidak hanya peningkatan aspek teknis melainkan mendorong pelaku industri agar mandiri dan sustainable, sehingga ekosistem alas kaki dapat lebih kuat. Pengurangan target ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada pelaku usaha.

Analisis Realisasi Belanja

Analisis Realisasi Anggaran Belanja dilakukan untuk menjadi salah satu bahan evaluasi dalam mengukur tingkat efektivitas pengelolaan anggaran, melalui analisis ini juga dapat dilakukan identifikasi penyebab terjadinya selisih antara anggaran dan realisasi.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja BPIPI Periode 2020-2024

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) % (Naik/Turun)

2020 20.910.057.000,00 20.554.037.846,00 98,30% -

2021 11.788.222.000,00 11.698.580.411,00 99,24% 0,94%

2022 13.810.889.000,00 13.801.054.024,00 99,93% 0,69%

2023 14.160.889.000,00 14.156.348.785,00 99,97% 0,04%

2024 15.495.000.000,00 14.979.005.880,00 96,67% -3,3%

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas, perbandingan capaian realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun anggaran.

Pada tahun 2020 pagu anggaran adalah 20.910.057 dengan realisasi sebesar 20.554.037.846 dengan persentase 98,30% sangat baik, pada tahun 2021 pagu anggaran 11.788.222.000 dan realisasi 11.698.580.411 dengan persentase 99,24%, pada tahun 2022 pagu anggaran adalah 13.810.889.000 dengan realisasi sebesar 13.801.054.024 dengan persentase 99,93% mengalami peningkatan sebesar 0,69%, pada tahun 2023 pagu anggaran adalah 14.160.889.000 dengan realisasi sebesar 14.156.348.785 dengan persentase 99,97% mengalami peningkatan sebesar 0,04%, pada tahun 2024 pagu anggaran adalah 15.495.000.000 dengan realisasi sebesar 14.979.005.880 dengan persentase 96,67% mengalami penurunan sebesar 3,3%. Penurunan persentase realisasi pada tahun 2024 berdasarkan data laporan keuangan tahun 2024 bahwasanya terdapat pagu blokir sebesar Rp510.180.000 yang tidak bisa dilakukan pencairan dana. Meskipun persentase penyerapan anggaran pada tahun 2024 mengalami penurunan, namun secara keseluruhan capaian realisasi anggaran BPIPI selama periode 5 (lima) tahun berada pada kategori efektif berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 terkait kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja[33]. Realisasi Belanja yang efektif menunjukkan proses penyusunan rencana anggaran dilakukan dengan matang melalui koordinasi antar tim yang baik[34].

Analisis Efisiensi Rincian Output

Analisis ini dilakukan untuk menghitung perbandingan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran, nilai efisiensi yang muncul akan menunjukkan apakah terjadi efisiensi (hemat) atau inefisiensi (pemborosan) dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam perhitungan nilai kinerja anggaran, analisis efisiensi rincian output memiliki skala maksimal 100%[28].

Tabel 6. Analisis perhitungan efisiensi rincian output periode 2020-2024

Tahun	Uraian	RO	CRO	Alokasi Anggaran	RO Realisasi	Anggaran	RO Efisiensi	RO Nilai Efisiensi
2020	Pengembangan Layanan IKM Persepatuan Melalui BPIPI	100%	7.850.000.000	7.746.182.000	1,86%	54,65%		
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100%	9.110.057.000	9.105.560.000				
	Layanan Perkantoran	100%	3.950.000.000	3.669.503.000				
2021	Fasilitas dan pengembangan industri	300%	5.461.412.000	5.400.408.000	111,85%	329,63%		
	Penyidikan dan pengujian produk	217%	601.677.000	600.243.000				
	Penelitian dan pengembangan purwarupa	250%	977.911.000	976.962.000				
	Layanan perkantoran	100%	4.747.112.000	4.687.271.000				
2022	Pengembangan Layanan IKM Persepatuan Melalui BPIPI	130%	7.598.000.000	7.594.276.703	16,58%	91,45%		
	Layanan Perkantoran	100%	6.212.889.000	6.206.778.073				
2023	Pengembangan Layanan IKM Persepatuan Melalui BPIPI	136%	7.060.889.000	7.060.010.062	18,06%	95,16%		
	Layanan Perkantoran	100%	7.100.000.000	7.096.339.340				
2024	Pemberdayaan IKM Persepatuan Melalui BPIPI	125%	7.129.983.000	7.126.915.401	11,96%	79,90%		
	Layanan Perkantoran	100%	7.854.837.000	7.852.276.071				
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	88.108.000	88.090.196				
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	71.729.000	71.631.615				

Berdasarkan perhitungan tabel di atas yang menunjukkan perbandingan nilai efisiensi rincian output selama 5 (lima) tahun di Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia berfluktuasi dari tahun ketahun. Tahun 2020 nilai efisiensi 54,65% dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2021 dengan persentase 329,63%. Jika melihat data realisasi anggaran, tahun 2020 memiliki pagu alokasi yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, namun capaian output yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan tahun 2021, berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 disebutkan bahwa terdapat penambahan belanja modal sebesar 9.110.057.000 yang diperuntukkan untuk peningkatan fasilitas laboratorium uji, dan dilakukan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid 19. Sedangkan untuk tahun 2021 mengalami lonjakan capaian output yang cukup tinggi, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga seluruh kegiatan BPIPI dengan pagu yang dialokasikan dilakukan secara online, kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini akan lebih fleksibel untuk mencapai hasil output yang lebih banyak dengan biaya yang lebih kecil. Pada tahun 2022 dan 2023 nilai efisiensi mencapai 95,45% dan 95,16% tergolong efisien, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan adanya pemblokiran pagu anggaran, sehingga alokasi anggaran rincian output tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Analisis Konsistensi Penyerapan Anggaran

Analisis konsistensi penyerapan anggaran dilakukan untuk menilai kualitas dari pola penyerapan anggaran pada satuan kerja, hal ini erat kaitannya dengan proses perencanaan anggaran. Konsistensi penyerapan anggaran yang sesuai dengan rencana penarikan dana menunjukkan perencanaan kegiatan yang baik dan pelaksanaan anggaran yang terjadwal. Perencanaan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan sumber daya yang lebih optimal dan meminimalisasi penumpukan anggaran pada akhir tahun, hal ini selaras dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efisien.

Tabel 1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Bulan Periode 2020-2022

2020 2021 2022

RPD Kumulatif Realisasi Kumulatif RPD Kumulatif Realisasi Kumulatif RPD Kumulatif Realisasi Kumulatif

01	433.511.000	175.559.741	433.390.000	135.125.891	459.755.000	211.103.155
02	1.408.928.000	1.021.349.762	1.014.246.000	664.563.663	1.361.293.000	959.570.635
03	2.279.446.000	2.014.204.711	1.816.201.000	1.495.969.096	2.829.116.000	2.295.000.715
04	2.833.405.000	2.579.460.268	2.823.160.000	2.582.990.973	4.015.259.000	3.799.309.075
05	3.520.517.000	3.191.554.387	3.554.013.000	3.324.878.802	5.007.605.000	4.559.922.797
06	4.189.882.000	4.011.481.783	4.641.612.000	4.364.758.897	6.373.786.000	6.071.714.751
07	5.388.303.000	5.233.338.818	5.682.658.000	5.274.990.152	7.420.693.000	7.168.946.644
08	8.202.233.000	7.915.814.078	6.934.078.000	6.589.812.690	8.573.328.000	8.333.133.445
09	9.152.826.000	8.900.757.530	8.215.263.000	7.934.740.576	9.415.974.000	9.310.381.358
10	11.563.464.000	11.018.324.177	9.837.473.000	9.449.635.712	10.418.560.000	10.239.750.252
11	12.554.141.000	12.466.273.603	10.766.669.000	10.516.516.151	12.257.725.000	11.908.554.723
12	20.910.057.000	20.554.037.846	11.788.122.000	11.698.580.411	13.810.889.000	13.801.175.648

Tabel 1. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Bulan Periode 2023-2024

2023 2024

RPD Kumulatif Realisasi Kumulatif RPD Kumulatif Realisasi Kumulatif

01	382.711.000	488.413.187	408.707.000	459.888.963
02	1.443.543.000	1.587.392.745	1.183.208.000	1.318.193.709
03	2.630.849.000	2.652.817.820	2.872.122.000	3.015.944.955
04	3.972.335.000	4.001.883.197	3.688.929.000	3.817.758.866
05	4.985.701.000	5.398.113.438	4.707.197.000	5.060.912.728
06	6.984.385.000	7.059.649.532	6.883.387.000	7.033.782.411
07	8.339.077.000	8.375.343.919	8.151.829.000	8.403.057.874
08	9.625.955.000	9.658.519.169	9.431.564.000	9.645.508.840
09	10.590.021.000	10.595.558.129	10.394.401.000	10.613.467.524
10	11.706.053.000	11.783.110.636	11.605.450.000	11.890.825.608
11	12.780.248.000	12.917.076.498	13.178.372.000	13.394.320.010
12	14.160.889.000	14.156.349.402	15.495.000.000	14.979.191.472

Tabel 2 Hasil Perhitungan Analisis Konsistensi Penyerapan Anggaran

Tahun Konsistensi Penyerapan Anggaran % (Naik/Turun)

2020 98% -

2021 99% 1%

2022 100% 1%

2023 100% -

2024 97% -3%

Berdasarkan perhitungan pada tabel, konsistensi penyerapan selalu mengalami kenaikan yang artinya pelaksanaan perencanaan anggaran setiap tahunnya selalu mengalami perbaikan, namun terdapat penurunan pada tahun 2024 sebesar 3%, hal ini disebabkan karena terdapat blokir anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, sehingga anggaran yang telah dicatat pada rencana kegiatan tidak dapat dilakukan pencairan anggaran. Semakin tinggi nilai konsistensi penyerapan menunjukkan semakin baiknya proses penyusunan rencana anggaran yang telah disusun setiap bulannya.

Analisis Penilaian Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran merupakan sebuah pengukuran yang digunakan untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada suatu entitas telah dilakukan dengan efektif dan efisien. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan pencapaian output, efisiensi penggunaan sumber daya, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja anggaran diperoleh melalui proses pengukuran terhadap keempat aspek tersebut yang menjadi indikator penting dalam analisis ini.

Tabel 3 Perhitungan Analisis Nilai Kinerja Anggaran

Tahun CRO PA ERO Konsistensi PA Nilai Kinerja Anggaran Kriteria

Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot

2020 100% 43,5% 98,30% 9,7% 54,65% 28,6% 98% 18,2% 86,55% Baik

2021 100% 99,24% 100% 99% 99,78% Sangat Baik

2022 100% 99,93% 91,45% 100% 97,53% Sangat Baik

2023 100% 99,97% 95,15% 100% 98,60% Sangat Baik



2024 100% 96,67% 79,90% 97% 93,32% Sangat Baik

Berdasarkan perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa nilai kinerja anggaran pada tahun 2020-2024 mengalami angka yang fluktuatif di setiap tahunnya. Penilaian ini diperoleh dari beberapa aspek indikator utama yang sebelumnya telah dilakukan perhitungan, yakni capaian rincian output, penyerapan anggaran, efisiensi rincian output, dan konsistensi penyerapan anggaran dengan masing-masing bobot penilaian sebesar 43,5%, 9,7%, 28,6%, dan 18,2%. Nilai kinerja anggaran pada tahun 2020 merupakan nilai terendah, hal ini dipengaruhi oleh capaian pada aspek ERO yang hanya memperoleh nilai 54,65% yang disebabkan karena besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan fasilitas laboratorium uji. Penggunaan anggaran untuk belanja modal cenderung membutuhkan biaya yang besar sehingga akan berdampak pada perhitungan efisiensi rincian output. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan 13,23% daripada tahun sebelumnya dengan nilai yang cukup tinggi yakni 99,78%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan 2,25% dikarenakan adanya perubahan tata kerja organisasi pada BPIPI pada pemberdayaan industri alas kaki sehingga terdapat pemangkasan target output. Terjadi peningkatan sebesar 0,79% pada tahun 2023 dan kembali mengalami penurunan nilai kinerja pada tahun 2024 sebesar 5,28% yang disebabkan adanya pagu blokir yang tidak bisa digunakan dalam optimalisasi layanan. Meskipun setiap tahunnya nilai kinerja anggaran BPIPI mengalami fluktuatif, namun kinerja anggaran BPIPI pada periode 2020-2024 secara keseluruhan tetap berada pada kategori baik hingga sangat baik yang menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran keuangan telah dilakukan secara efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan analisis efektivitas dan Efisiensi Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Periode 2020-2024 menunjukkan nilai kinerja yang sangat fluktuatif dari tahun ketahun. Pada pembahasan akhir perhitungan analisis nilai kinerja anggaran yang merupakan hasil dari penambahan aspek-aspek indikator penilaian kinerja dapat dilihat nilai persentase pada tahun 2020 adalah 86,55% dengan kriteria baik, kemudian pada tahun 2021 dikategorikan sangat baik dengan nilai 99,78%, selanjutnya ditahun 2022 masih bertahan pada kriteria baik namun mengalami penurunan dengan nilai 97,53%, tahun 2023 kembali mengalami kenaikan dengan nilai 98,60%, dan ditahun 2024 kembali mengalami penurunan nilai kinerja dengan nilai 93,32%. Angka yang berbeda setiap tahunnya menunjukkan komitmen BPIPI untuk memperbaiki proses pelaksanaan anggaran, namun pada prakteknya masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan anggaran seperti adanya pandemi, perubahan undang-undang, penyusunan perencanaan anggaran, hingga adanya kebijakan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, tingginya nilai yang dicapai pada setiap indikator menunjukkan bahwasanya pengelolaan anggaran pada Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia telah dilakukan secara efektif dan efisien serta mampu mendukung capaian target program dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Saran dari penulis yang dapat dijadikan masukan bagi Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia kedepannya untuk bisa meningkatkan koordinasi yang antara setiap bidang-bidang kerja agar dapat melaksanakan program yang direncanakan dengan baik, serta terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam menentukan tingkat target output pada masing-masing program yang masih kurang berjalan dengan maksimal.